

ANTISIPASI LONJAKAN KASUS COVID-19

Masyarakat Diimbau Lengkapi Vaksinasi

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk segera melengkapi dosis vaksinasi Covid-19. Hal itu sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

"Masyarakat diimbau untuk segera melengkapi dosis vaksin Covid-19, segera datang fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di Puskesmas atau Kantor Kesehatan Pelabuhan, jangan ditunda tunda," kata Dirjen Pencegahan dan

Pengendalian (P2P) Kemkes Maxi Rein Rondonu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/12).

Aturan untuk melengkapi dosis vaksinasi Covid-19 itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor IM.02.04/C/4864/ 2023 tanggal 15 Desember 2023. Situasi Covid-19 di Indonesia saat ini menunjukkan adanya tren peningkatan kasus sejak pekan ke-41 atau periode 8-14 Oktober 2023.

Data hingga Jumat (15/12) menunjukkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 336 atau meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Karena itu, perlu ada upa-

ya pencegahan penularan yang dilakukan serentak oleh seluruh elemen masyarakat, salah satunya vaksinasi.

"Bagi masyarakat, terutama lansia dan dewasa yang memiliki komorbid serta penyandang imunokompromais, yang sudah pernah memperoleh vaksinasi Covid-19 minimal 6-12 bulan yang lalu, dapat diberikan satu dosis vaksin Covid-19," kata Maxi.

(Ant/Has)-f

Dewan Pers Coret Sejumlah Lembaga UKW

YOGYA (KR) - Sejumlah lembaga penyelenggara uji kompetensi wartawan (UKW) di Indonesia dicoret Dewan Pers. Bahkan, salah satu lembaga UKW sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) terpaksa dicoret, karena tidak eksis dalam menjalankan UKW.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pers Ko-

missi Pendidikan Pelatihan Pengembangan Profesi, Paulus Tri Agung Kristanto, saat menutup kegiatan UKW 1 Lembaga UKW PT BP *Kedaulatan Rakyat* (KR) di Royal Darmo Malioboro Hotel, Sabtu (16/12).

Menurutnya, Lembaga UKW PT BP KR pada tahun 2023 ini berhasil

melaksanakan UKW pertama kali dan diharapkan ke depan semakin eksis. "Sudah ada beberapa lembaga UKW dicoret Dewan Pers. Ada juga lembaga uji PTN ternama yang dicoret di Jakarta," ungkap Tri Agung Kristanto.

Selain itu, ia mengungkapkan ada beberapa lembaga uji yang berada di lu-

ar Jawa lainnya juga dicoret. Agung Kristanto menyatakan, Lembaga UKW PT BP KR ini bisa menyelenggarakan dan eksis atau tidaknya tergantung teman-teman di KR sendiri. "Kami ucapkan selamat atas keberhasilan lembaga uji kompetensi wartawan PT BP KR menyelenggarakan UKW pertama ini," kata Tri Agung atau Mas Tra ini.

Terkait dengan pencoretan lembaga UKW ini, pada Senin (18/12) Dewan Pers menggelar rapat untuk menutup dan mencoret satu lembaga uji sebuah media massa di luar Jawa. Ia menilai, dengan UKW ini meningkatkan profesionalisme sebagai wartawan.

UKW 1 PT BP KR diikuti 6 peserta, terdiri 4 wartawan *KR* dan 2 wartawan Koran Merapi (KR Group) selama dua hari, Jumat-Sabtu (15-16/12) dengan 10 mata uji.



KR-Ustimewa

Peserta UKW PT BP KR berfoto bersama Dewan Pers dan penguji.

BERDASARKAN PERISTIWA HADEGING NAGARI NGAYOGYAKARTA HADININGRAT

13 Maret 1755 Sebagai Hari Jadi DIY

YOGYA (KR) - Hari jadi sebuah daerah dapat dipahami sebagai waktu dimulainya eksistensi suatu daerah menjadi tempat awal bermukim dan berkehidupan baik secara ekonomi, sosial, politik maupun kultural dan berkeadaban.

Untuk itu, menurut Sejarawan UGM dan anggota Tim Penyusun Naskah Akademik Hari Jadi DIY Baha Uddin MHum, hari jadi daerah merupakan sebuah peristiwa simbolik yang mencerminkan tonggak penting dimulainya sebuah tatanan dan peradaban baru pada daerah tersebut, sehingga dapat dipahami jika setiap daerah di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dalam menetapkan hari jadinya sesuai dengan aspek historisnya masing-masing.

Hal lain yang perlu dipahami juga adalah bahwa hari jadi ini tidak selalu identik dengan pembentukan sebuah wilayah secara administratif dan yuridis formal, yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia.

"Faktor historis yang unik pada masing-masing daerah tetaplah menjadi faktor utama dalam menentukan hari jadinya," kata Baha Uddin terkait penetapan hari jadi DIY, 13 Maret 1755 yang telah disepakati Panitia Khusus (Pansus) BA 45 DPRD DIY dan sesuai yang diusulkan Pemda DIY dalam kegiatan *Public Hearing* Raperda Hari Jadi DIY di Ruang Rapur DPRD DIY, Jumat (15/12).

Lebih lanjut dikatakan, keberadaan hari jadi DIY memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemda karena berfungsi untuk memantapkan jati diri, landasan gerak langkah masa depan, melengkapi identitas diri wilayah, tonggak dimulainya sebuah pemerintahan, dan sebagai acuan peringatan bersejarah sebagai refleksi terwujudnya idealisme, harapan-harapan, kesuksesan, dan perjuangan tanpa henti untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.

Untuk mendapatkan hari jadi DIY yang sesuai dengan kesejarahannya, lanjut Baha Uddin, maka harus memenuhi beberapa kriteria yaitu dapat dipertanggungjawab-

kan secara historis, mencerminkan citra dan profil kewilayahan, mengandung nilai semangat kebangsaan dan keindonesiaan, serta menimbulkan kebanggaan bagi warganya.

Selain itu, kata Baha Uddin, keberadaan hari jadi DIY ini juga mendesak mengingat kabupaten/kota yang ada di DIY semuanya sudah memiliki hari jadinya, sehingga hari jadi DIY akan melengkapinya.

Dikatakan, faktor penting yang perlu dipahami dalam konteks historis sebuah daerah adalah adanya perubahan dan keberlanjutan (*change and continuity*). Bahwa dalam perkembangan zaman sebuah daerah pada aspek tertentu akan mengalami perubahan karena berbagai faktor, namun demikian juga ada aspek lain yang mencerminkan sebuah keberlanjutan.

Hal ini juga terjadi pada Yogyakarta. Perubahan pada entitas Yogyakarta terjadi pada aspek bentuk administratif pemerintahannya.

"Sejak tanggal 13 Maret 1755, dengan Peristiwa Hadeging Nagari, Yogyakarta dideklarasikan menjadi sebuah Nagari dengan bentuk pemerintahan sebagai Kasultanan (kerajaan) dengan kedudukan sebagai daerah independen," jelas Baha Uddin.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, lanjutnya, wilayah Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman) secara administratif pemerintahan berstatus sebagai daerah Vor-

stenlanden, yaitu daerah khusus yang memiliki otonomi karena pemerintahannya diperintah oleh raja, dengan kedudukan sebagai *zelfbestuurende landschappen* (daerah swapraja/daerah otonom/daerah istimewa).

"Sejak saat itu secara administratif pemerintahan kolonial di Yogyakarta menjadi sebuah Karesidenan," katanya.

Menurut Regeering Reglement Tahun 1854, Yogyakarta termasuk daerah yang diperintah dengan *indirect gebied* yaitu daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh Gubernur Jenderal. Untuk itu kemudian ditempatkan Residen sebagai representasi pemerintah kolonial di Yogyakarta.

"Pada 1927 status administratif daerah Yogyakarta sebagai karesidenan ditingkatkan menjadi provinsi, sehingga pejabat kolonialnya bukan lagi residen melainkan gubernur," jelasnya.

Pada masa pendudukan Jepang, lanjutnya, tanggal 1 Agustus 1942, bentuk pemerintahan administratif Yogyakarta berubah menjadi *Kooti* (daerah istimewa) dan Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi Koo (kepala daerah istimewa).

Selanjutnya pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Hamengku Buwono IX bersama dengan Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat 5 September 1945 yang menyatakan bahwa, daerah Kasultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan status sebagai daerah



KR-Wawan Isnawan
Baha Uddin MHum

istimewa.

Kemudian menurut UU Nomor 3 Tahun 1950, dengan jelas disebutkan bahwa Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi yang wilayahnya terdiri dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Meskipun bentuk administratif Yogyakarta mengalami perubahan sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman, namun ada aspek yang tidak pernah mengalami perubahan atau mencerminkan adanya keberlanjutan yaitu sifat dan hakikatnya. "Sejak didirikan hingga kini sifat dan hakikat Yogyakarta adalah sebuah kerajaan," kata Baha Uddin.

Perubahan bentuk Yogyakarta ini merupakan strategi dalam mempertahankan diri (*survival spirit*) dan keberlangsungan (*sustainability spirit*) sebagai sebuah entitas agar eksistensinya tetap terjaga.

Menurut Baha Uddin, UU

DIGELAR PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY Peringatan Sejarah Agresi Militer Belanda II

YOGYA (KR) - Sejarah yang ada di Indonesia, khususnya di Yogya, adalah nyata adanya. Sayangnya, tidak semua generasi muda tertarik sejarah. "Namun demikian, sejarah tidak boleh ditinggalkan," kata Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSI.

Hal itu dikatakan Aris terkait acara peringatan peristiwa sejarah Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948 yang digelar Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI).

Sejarah, lanjut Aris, merupakan bagian dari hari ini. "Karena adanya peristiwa sejarah yang pernah ada di Yogya maupun di Indonesia, maka tugas kita adalah mendekatkan sejarah kepada kaum milenial," katanya.

Dengan demikian, kaum milenial semakin mengetahui tentang perjalanan sejarah yang ada di Indonesia, khususnya di Yogya, baik melalui media sosial, YouTube, film maupun berbagai tulisan di media cetak.

"Kita berharap generasi milenial tidak lupa sejarah, dan menjadikan nilai penting tentang patriotisme, semangat perjuangan sebagai pembelajaran untuk membangun bangsa Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Aris.

Menurut Aris, tugas utama berkaitan dengan sejarah adalah bagaimana kita mendekatkan sejarah masa lalu dengan masa kini. Untuk itu perlu digunakan pola-pola kini guna mengenalkan sejarah masa lalu melalui YouTube, film dokumenter



KR-Wawan Isnawan
Aris Eko Nugroho SP MSI

juga melalui program Rembang Kaistimewaan tentang hari sejarah tersebut.

"Kami berharap, adanya nilai penting yang ada dalam sejarah itu bisa disebarluaskan kepada generasi muda, sehingga generasi muda juga semakin mengenal tentang nilai-nilai kejujuran yang pernah ada di Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya.

Aris juga mengatakan, Paniradya Kaistimewan DIY tentu saja selalu terbuka jika ada masukan yang berkaitan dengan pengenalan sejarah di masa kini. "Kami berharap jangan sampai kita melupakan sejarah yang ada di daerah masing-masing," katanya pula.

Dengan mengenal sejarah, mengenal silsilah leluhur, kita berterima kasih kepada pahlawan yang rela memperjuangkan seluruh tanah air yang ada di Indonesia, khususnya di Yogya.

Peristiwa sejarah penting untuk diperingati. Tidak kecuali sejarah Agresi Militer Belanda II. "Kita tidak boleh

melupakan bahwa sejarah itu ada yang kelam ada juga yang cemerlang, tapi bagaimana runtutan sejarah itu bisa diceritakan di suatu hari kepada generasi berikutnya," katanya.

Diharapkan, sejarah dapat membantu kita memahami orang dan juga masyarakat. Kecuali itu kita juga bisa mengulik tentang nilai penting peristiwa sejarah. "Kita petik hal yang baik dari sejarah sebagai pembelajaran untuk memperbaiki sesuatu di masa yang akan datang.

Peringatan peristiwa sejarah Agresi Militer Belanda II dikemas dalam Sinau Sejarah Keistimewaan DIY, dan akan digelar Selasa (19/12), pukul 09.00 di SMA Negeri 4, Jalan Magelang, Yogya.

Acara peringatan peristiwa sejarah Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948 ini bertema 'Fase Kelam Sejarah Republik'. Dalam acara tersebut akan diputar video dokumenter berjudul 'Agresi Militer Belanda II: Hidup Matinya Republik'.

Selain itu ada pula Dialog Keistimewaan 'Fase Kelam Sejarah Republik' dengan narasumber Ariyanti Luhur Tri Setyarini SH (Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewan), Julianto Ibrahim MHum (Sejarawan UGM), Agus Tony Widodo SPd (Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia/AGSI DIY, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Bantul) dan Muhammad Tanjung Akmal (Siswa SMA Negeri 4) dengan moderator Wijil Rachmadani.

Acara ini akan dipandu MC Gundhissos, dan diemban grup musik dan tari dari SMA Negeri 4 dengan bintang tamu Intermezzo Band. (Wan)

Octo berharap agar mereka yang sudah lulus terus meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan profesi. Ketua Tim Penguji UKW Lembaga Uji PT BP

KR, Hudono mengatakan, nilai untuk bisa dinyatakan kompeten sebagai wartawan minimal 70 setiap mata uji, dimana ada 10 mata uji yang harus dilalui. (Sus)-f



Kraton Yogyakarta

KR-Wawan Isnawan